

Opini

OPINI: Kebhinekaan dan Keadilan

Rabu, 14 Maret 2018 17:04

Editor: Catur waskito Edy

hari hadir di depan mata kita. Cara berpikir masyarakat telah terkonstruksi sedemikian rupa dengan imaji-imaji komodernan dan kemajuan, padahal menyimpan praktik ketidakadilan.

Contoh ketidakadilan sosial yang dapat kita saksikan sehari-hari tetapi tampak wajar bagi sebagian besar masyarakat kita adalah menjamurnya toko-toko waralaba



keadilan sosial terutama bagi tukang ojek konvensional yang bekerja hanya dengan modal motor dan jaket. Demikian juga, masyarakat pengguna diharapkan agar tidak mudah terblus dengan sistem transportasi baru ini tetapi diharapkan juga turut kritis dan peduli terhadap nasib tukang ojek pangkalan. Catatan penting lain terkait pe...

Oleh Muhammad Taufiqurrohman

Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto

TRIBUNJATENG.COM - Dunia sedang dilanda ancaman baru bernama fanatisme golongan. Bentuknya yang paling nyata adalah menguatnya primordialisme berlatar agama, suku atau kelompok. Dalam skala internasional, menangnya sosok Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ditengarai telah menjadi tanda menguatnya primordialisme global tersebut. Baru-baru ini, kebijakan Trump yang akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerussalem terbukti telah memicu kontroversi dunia. Kekhawatiran global akan terjadinya Perang Dunia Ketiga menjadi hantu yang tak terelakkan.

Di Indonesia, ancaman primordialisme tersebut tidak kalah kuatnya. Dipercepat dengan hadirnya teknologi media, khususnya media sosial, primordialisme terutama yang berlatar fanatisme agama telah tumbuh bak jamur di musim hujan.

Hitungan pertumbuhannya bukan lagi dalam hitungan tahun, bulan atau bahkan hari, tetapi dalam hitungan detik. Secepat keyboard gawai ditekan. Dalam hitungan persekian detik, berbagai informasi tak terkecuali yang penuh dengan nuansa fanatisme atau primordialisme dengan sangat mudah tersebar untuk kemudian dikonsumsi oleh ribuan bahkan jutaan umat manusia.

Menghadapi ancaman global sekaligus nasional tersebut, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk membendung jamur primordialisme tersebut. Berbagai gerakan masyarakat sipil pun lahir untuk menangkal penyebaran penyakit masyarakat tersebut. Semua pihak tersebut bersepakat untuk terus merawat, menjaga dan mengembangkan kebhinekaan yang telah ratusan atau bahkan ribuan tahun menjadi jiwa dalam masyarakat kita.



1000

Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah melakukan upaya-upaya menjaga kebhinekaan kita sebagai bangsa, rasanya ada persoalan lain yang luput dari perhatian kita. Benar bahwa primordialisme telah mengancam kebhinekaan kita, tapi ada persoalan lain yang tak kalah pentingnya, yaitu keadilan sosial.

Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa tingkat ketimpangan antara yang kaya dan miskin masih lebar ditunjukkan dengan rasio gini masih di angka 0,393. Ketimpangan yang menganga tersebut jelas menunjukkan bahwa keadilan sosial belum terwujud di bumi nusantara. Keadilan sosial tidak hanya menjadi kesepakatan bersama tetapi telah tertancup dalam Pancasila sebagai salah satu dasar bernegara kita. Namun, faktanya perjalanan berbangsa kita justru makin menjauh dari dasar tersebut.

Data statistik di atas sesungguhnya hanya mengkonfirmasi keresahaan sehari-hari kita atas kecenderungan kuat dalam masyarakat kita, termasuk mereka yang dengan tulus menjaga kebhinekaan, untuk mengabaikan persoalan ketidakadilan sosial yang sehari-hari hadir di depan mata kita. Cara berpikir masyarakat telah terkonstruksi sedemikian rupa dengan imaji-imaji komodernan dan kemajuan, padahal menyimpan praktik ketidakadilan.

Iklan untuk Anda: Viral Ustadz Hanan Attaki Ditolak Ceramah di Pamekasan Madura, Ini Kata Ketua PCNU Pamekasan

Advertisement by Zepooh

Contoh ketidakadilan sosial yang dapat kita saksikan sehari-hari tetapi tampak wajar bagi sebagian besar masyarakat kita adalah menjamurnya toko-toko waralaba dengan modal besar yang menggentet toko-toko kelontong kecil di sekitar kita. Negara dengan perijinan yang longgar, baik di tingkat pusat maupun daerah, seolah tidak hadir untuk melindungi orang-orang kecil dengan modal kecil tersebut dari serangan ekspansi gurita industri ritel. Bahkan jika kita amati lebih teliti, ekspansi tersebut telah masuk ke desa-desa terpencil. Dengan modal super besar, para pemain industri ritel ini mampu hadir di pelosok-pelosok, bahkan sampai di depan pintu rumah kita dengan sistem layanan antar jemputnya. Masyarakat yang sedang terbuai dengan apa yang disebut janji-janji kemodernan dan kemajuan cenderung melupakan toko sebelah atau belakang rumahnya dan mulai menikmati layanan "modern" tersebut.

Fenomena sosial lain yang mengungkap potensi ketidakadilan sosial tersebut adalah industri jasa ojek online. Dengan modal besar, perusahaan ojek online tersebut mampu memberi bonus kepada driver sekaligus menurunkan biaya argo dari rata-rata ojek pangkalan. Tentu saja berhadapan dengan modal besar tersebut, para tukang ojek pangkalan yang tidak bekerja kepada siapapun (tidak menjadi bagian dari suatu perusahaan) akan merasa terancam dan tergencet ruang penghidupannya yang sudah sangat sempit tersebut.





Dari sisi masyarakat sebagai pengguna, tentu saja ojek online menjadi hal yang lumrah diterima karena cara kerjanya yang efektif dan ekonomis. Namun demikian, perlu intervensi pemerintah yang lebih serius agar tercipta keadilan sosial terutama bagi tukang ojek konvensional yang bekerja hanya dengan modal motor dan jaket. Demikian juga, masyarakat pengguna diharapkan agar tidak mudah terbius dengan sistem transportasi baru ini tetapi diharapkan juga turut kritis dan peduli terhadap nasib tukang ojek pangkalan.

Catatan penting lain terkait pekerjaan rumah menciptakan keadilan sosial ini terdapat dalam cerita buram konflik agraria. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat peningkatan jumlah konflik agraria sepanjang 2017. Setidaknya terdapat 659 konflik agraria yang terjadi di Indonesia, yang berarti ada puluhan ribu warga bangsa yang saat ini tidak bisa tidur nyenyak karena ruang hidupnya terancam atau bahkan sudah dihilangkan. Salah satu penyebab konflik agraria tersebut adalah proyek-proyek mercusuar pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh yang mencuat akhir-akhir ini adalah pembangunan mega bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang sampai saat ini masih menyisakan sengketa konflik. Lebih dari itu, dalam beberapa kasus agraria, telah terjadi kriminalisasi orang-orang kecil yang memperjuangkan lingkungan dan ruang hidupnya secara bermartabat melalui jalur-jalur resmi (hukum). Dua contoh mencolok adalah kriminalisasi terhadap Joko Prianto, dari Kendeng Rembang dan Budi Pego dari Tumpang Pitu Banyuwangi. Dua-duanya merupakan pejuang lingkungan yang berusaha mempertahankan tanah airnya dari pengrusakan pertambangan.

Berjalan Beriringan

Dalam pandangan saya, beberapa contoh isu di atas, sebagai representasi dari persoalan ketidakadilan sosial di negeri kita, tidak mendapatkan cukup perhatian dari sebagian besar masyarakat kita, termasuk dari para pejuang kebhinekaan. Tentu saja saya memahumi bahwa merupakan suatu pilihan taktis strategis bagi suatu gerakan untuk memiliki satu titik fokus. Namun demikian, kebhinekaan tanpa keadilan sosial hanya akan memuluskan jalan para oligarki dengan kekuatan modal raksasa mereka untuk terus melakukan ekspansi di segala lini kehidupan. Perjuangan terhadap kebhinekaan harus dilandas-tumpukan pada perjuangan untuk terciptanya keadilan sosial. Kebhinekaan yang sejati bertumpu pada keadilan sosial, bukan justru menutup mata dari persoalan ketidakadilan sosial. Hanya dengan cara pandang demikian, kita dapat menginsyafi fenomena global ekstrimisme sebagai salah satu produk ketidakadilan sosial ekonomi politik, baik dalam skala global, nasional maupun lokal.

Akhirnya, upaya menjaga kebhinekaan seharusnya berjalan beriringan dengan perjuangan memerangi ketidakadilan sosial. Perjuangan kebhinekaan seharusnya juga bermuara pada perwujudan keadilan sosial. Hal-hal yang mengusik rasa keadilan seharusnya juga menjadi musuh para pejuang kebhinekaan. Guru bangsa kebhinekaan kita, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam salah satu orasi kebudayaannya di Batu Malang tahun 2005, mengatakan, "orientasi pembangunan (negara) harus dirubah menjadi berorientasi kepada kelompok rakyat, bukan berorientasi kepada kelompok kaya. Bukannya rakyat dijadikan kaya, kaya bersama, tetapi pembangunanisme justru menjadikan yang kaya semakin kaya, semakin berlebih". Menjadi pejuang kebhinekaan, dengan demikian, sudah seharusnya juga menjadi pejuang keadilan sosial. (*)

